# MODEL PEMBERDAYAAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN JEPARA

**Nur Khoiri***

[1]*Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang*

**E-mail: nurkhoiri@walisongo.ac.id*

## ABSTRAK

Peraturan Menteri (Permen) No 75/2016 tertanggal 30 Desember 2016 yang menjadi dasar pembentukan komite sekolah dan dewan pendidikan, tujuan dibentuknya komite adalah mewadahi, menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan, meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, serta menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan serta pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan. Komite sekolah dianggap sebagai masalah baru bagi orangtua siswa karena menjadi aktor utama di balik mahalnya biaya sekolah. Keberadaannya sekadar menstempel setiap kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah, terutama untuk menarik dana dari orangtua siswa.

Memperhatikan hasil identifikasi permasalahan dalam partisipasi masyarakat dalam pendidikan, maka rumusan masalahnya, sebagai berikut:

1. Sejauhmanakah partisipasi masyarakat kategori formal; komite sekolah dan dewan pendidikan jepara dalam pendidikan dasar baik negeri maupun swasta di kabupaten Jepara tahun 2017.
2. Sejauhmanakah partisipasi masyarakat kategori non formal; LSM, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, organisasi politik, tokoh agama dan tokoh masyarakat Jepara dalam pendidikan dasar baik negeri maupun swasta di kabupaten Jepara tahun 2017.
3. Bagaimanakah model partisipasi masyarakat yang dapat mendorong peran serta secara aktif dalam pendidikan dasar di kabupaten Jepara tahun 2017.

Strategi penelitian non eksperimental yang diklasifikasikan ke dalam Ex post Facto. Populasi penelitian ini adalah Masyarakat Jepara non pemerintah (kategori formal; dewan pendidikan dan komite sekolah dan non formal; LSM, Organisasi keagamaan, kepemudaan, orsospol dan tokoh agama dan masyarakat) yang mempunyai perhatian dan peran terhadap pendidikan tahun 2017 yang berjumlah 2048 Responden. Sampel penelitian menggunakan teknik Cluster random sampling (pengambilan sampel secara acak berumpun) dengan prosentase 10% maka responden Penelitian 205 Orang. Teknik pengumpulan data dan teknik analisa data; Angket tertutup pada variabel partisipasi masyarakat formal dan non formal dalam pendidikan dasar kabupaten Jepara tahun 2017 dengan Teknik analisis statistik deskriptifdan angket terbuka pada variabel tentang model partisipasi masyarakat yang dapat mendorong peran serta secara aktif dalam pendidikan dasar di kabupaten Jepara tahun 2017 dengan analisis SWOT.

Kesimpulan Penelitian sebagai berikut: **Pertama** Keikutsertaan Masyarakat non Pemerintah kategori Formal baik Dewan Pendidikan Jepara maupun Komite sekolah/Madrasah tahun 2017 yang mempunyai perhatian dan peranan terhadap pendidikan dasar dapat ditunjukkan sebagai berikut 0,98 % mempunyai tingkat partisipasi sangat rendah, 9,8 % memiliki tingkat partisipasi pendidikan rendah, 64,71 % berpartisipasi tinggi dan 24,51 % berpartisipasi pendidikan klasifikasi sangat tinggi, **Kedua** Masyarakat non pemerintah katagori non Formal; terorganisasi (LSM, Organisasi Kepemudaan, ORMAS, dan Orsospol) dan tidak terorganisir (Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat) kabupaten Jepara tahun 2017 yang mempunyai peranan dan perhatian terhadap pendidikan dasar antara lain dapat dipaparkan sebagai berikut 2,91 % mempunyai partisipasi pendidikan kategori buruk, 37,86 % berpartisipasi baik dan 59,23 % berpartisipasi terhadap pendidikan kategori sangat baik. **Ketiga** Model partisipasi masyarakat yang dapat mendorong peran serta secara aktif dalam pendidikan dasar di kabupaten Jepara tahun 2017 antara lain 1. Pemberdayaan Manajemen berbasis masyarakat (MBS) sebagai upaya kongkret otonomi sekolah/Madrasah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui antara lain : keleluasaan mengelola sumber daya, penyederhanaan birokrasi. Sedangkan peningkatan mutu diperoleh antara lain melalui kontrol dan partisipasi orangtua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah, berlakunya sistem insentif, dan lain-lain, 2. Menerapkan kepemimpinan visioner yaitu yang memiliki karakteristik antara lain kredibilitas dan dapat dipercaya oleh pengikutnya (mengakar), integritas yang tinggi terhadap pekerjaannya, Kompeten di bidangnya dan mampu membangun komunikasi, Konsisten dan loyal, yakni memiliki ketaatan pada misi dan visi organisasi dan Terbuka, yakni tidak menutup diri dari input yang berasal dari luar, 3.

Keterlibatan dan mendorong secara aktif dan dinamis partisipasi dalam pendidikan antara lain dengan keterlibatan dalam memberikan pelayanan tertentu, biasanya sebagai mitra pihak lain., Keterlibatan sebagai pelaksana kegiatan yang telah didelegasikan. Misalnya, sekolah meminta komite sekolah/madrasah dan orang tua murid tertentu memberikan penyuluhan pada masyarakat tentang pentingnya pendidikan, mencatat anak usia sekolah, dan sebagainya. Peran serta yang sebenarnya dalam pengambilan keputusan pada berbagai jenjang.
**Kata kunci:** pemberdayaan, partisipasi masyarakat, pendidikan dasar

## ABSTRACT

*The Minister of National Education Tax 075/ 2016 which is the basic formation of the school committee and board of education, the goal is the establishment mewadahi committee, provided the aspirations and initiatives in the community bears the operational policies and programs of education in education, increase the responsibility and the role of active and the whole society in education in the education unit, and to create atmosphere and condition transparent, accountable, democratic and in the services and quality education in the education unit. The school committee is treated as a new problem for parents as a main actor behind the expensive school fees. Existence is simply menstempel every policy made by the head of school, especially to attract funds from the parents. Given the problems in the identification of community participation in education, the formulation of the problem, as follows:*

1. *How is formal participation of the community category; the school committee and board of education in basic education Jepara both public and private sector in Jepara district in 2017.*
2. *How is participation of non-formal category; religious organizations, youth organizations, political organizations, religious leaders and community leaders in basic education Jepara both countries and the private sector in Jepara district in 2017.*
3. *How is the model of community participation that can encourage the active participation in basic education in Jepara district in 2017.*

*Non-experimental research strategies are classified into the Ex post facto. Population of this research is non-governmental Society Jepara (formal category; education councils and committees and non-formal schools, religious organizations, youth, the religious leaders and communities) that have the attention and the role of education in 2017 which amounted to 2048 respondents. Sample research using cluster random sampling technique (random sampling berumpun) with 10% Percentage of respondents of the 205 people. Engineering data collection and data analysis techniques; Angket closed on the variable of community participation and formal non-formal in basic education Jepara district in 2017 with the descriptive statistical analysis techniques and angket open to the variable on the model of community participation that can encourage the active role of basic education in Jepara district in 2017 with a SWOT analysis. Research conclusions are as follows: First Community Participation category Formal non-government both the Board of Education Committee of Jepara and the school / madrasah in 2017 that has the attention and the role of basic education can as indicated below 0.98% have a level of participation is very low, 9.8% have low levels of participation in education, participation 64.71% 24.51% and higher education participate in the classification is very high, two non-governmental community that non-formal; organized (youth organizations, mass organizations, and Orsospol) and is not organized (Figure Figure Religion and Society) Jepara district in 2017 and who has the role of attention to basic education could be presented as follows: 2.91% have poor participation in education category, 37.86% participation 59.23% good, and to participate in the education category is very good. The three models of community participation that can encourage the active participation of basic education in Jepara district in 2017, among others: 1) Empowerment of community-based Management (MBS) as a means of autonomy kongkret school / madrasah which aims to improve the efficiency, quality and equity in education. Increasing the efficiency obtained through, among others: freedom to manage resources, bureaucratic simplification. While increasing the quality obtained through control and participation of parents against schools, school management and the flexibility of the classroom, increase the professionalism of teachers and principals, the introduction of an incentive system, and others, 2) Applying the visionary leadership that has credibility among other characteristics and can be trusted by followers, the high integrity of the job, competent in the field and able to build communication, Consistent and loyal, that is, have a devotion to the mission and vision of the organization and the Open, which is not cover themselves from the input that comes from outside, 3) Involvement and encourage the active and dynamic participation in education, among others, with involvement in providing certain services, usually as a partner the other party. Involvement as activities that have been delegated. For example, ask the school committee the school / madrasah students and parents to provide specific counseling to the community about the importance of education, record of school age children, and so forth. And the actual roles and in decision making at various levels*

***Key word:*** *empowerment, community participation, basic education*

## A. PENDAHULUAN

Masyarakat memandang sekolah (lembaga pendidikan) sebagai cara orang meyakinkan dalam membina perkembangan para siswa, karena itu masyarakat berpartisipasi dan setia kepadanya (Wals, 1973 dalam Pidarta,1988). Lebih lanjut dijelaskan oleh Pidarta, bahwa partisipasi itu tidak terjadi secara otomatis, terutama di negara-negara yang sedang berkembang, termasuk di Indonesia. Hal ini disebabkan karena banyak warga yang belum paham akam makna lembaga pendidikan, lebih-lebih bila kondisi sosial ekonomi mereka rendah.

Peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan memiliki posisi yang sangat penting dan strategis. Hal itu diakui secara resmi, baik dalam undang-undang maupun beberapa peraturan Menteri. Menurut Undang- undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003, pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Pada lingkup yang lebih luas lagi, masyarakat juga ikut bertanggung jawab atas pendidikan, pada tingkat makro, pemerintah bertanggung jawab atas pendidikan bagi warga negaranya.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 yang menjadi dasar pembentukan komite sekolah dan dewan pendidikan, tujuan dibentuknya komite adalah mewadahi, menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan, meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, serta menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan serta pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Peran serta masyarakat juga merupakan bagian penting dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah. Untuk itu, maka upaya menggalang peran serta masyarakat bagi terlaksananya pendidikan perlu diusahakan, disamping terlaksananya aspek-aspek lain dalam penyelenggaraan MBS.

Masyarakat merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi sekolah, semua siswa yang berada di sekolah berasal dari masyarakat sekitar, masyarakat akan tinggal di sekitar sekolah sepanjang 24 jam. Masyarakat merupakan salah satu sumber pemasukan uang pemerintah, oleh karena itu masyarakat merupakan aset penting dalam pembangunan termasuk dalam dunia pendidikan.

Sistem pendidikan yang selama ini dikelola dalam suatu iklim birokratik dan sentralistik dianggap sebagai salah satu sebab yang telah membuahkan keterpurukan dalam mutu dan keunggulan pendidikan di tanah air. Mengapa demikian?, karena sistem birokrasi selalu menempatkan "kekuasaan" sebagai faktor yang paling menentukan dalam proses pengambilan keputusan. Sekolah- sekolah saat ini telah terkungkung oleh kekuasaan birokrasi yang "menggurita" sejak kekuasaan tingkat pusat hingga daerah bahkan terkesan semakin buruk dalam era desentralisasi ini. Ironisnya, kepala sekolah dan guru-guru sebagai pihak yang paling memahami realitas pendidikan berada pada tempat yang "dikendalikan". Merekalah seharusnya yang paling berperan sebagai pengambil keputusan dalam mengatasi berbagai persoalan sehari-hari yang menghadang upaya peningkatan mutu pendidikan. Namun, mereka ada dalam posisi tidak berdaya dan tertekan oleh berbagai pembakuan dalam bentuk juklak dan juknis yang "pasti" tidak sesuai dengan kenyataan obyektif di masing-masing sekolah. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kekuasaan birokrasi persekolahan telah membuat sistem pendidikan kita tak pernah terhenti dari keterpurukan.

Kekuasaan birokrasi jugalah yang menjadi faktor sebab dari menurunnya semangat partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dulu, sekolah sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat, dan merekalah yang membangun dan memelihara sekolah, mengadakan sarana pendidikan, serta iuran untuk mengadakan biaya operasional sekolah. Jika sekolah telah mereka bangun, masyarakat hanya meminta guru-guru kepada pemerintah untuk diangkat pada sekolah mereka itu. Pada waktu itu, kita sebenarnya telah mencapai pembangunan pendidikan yang berkelanjutan (*sustainable development*), karena sekolah adalah sepenuhnya milik masyarakat yang senantiasa bertanggungjawab dalam pemeliharan serta operasional pendidikan sehari-hari. Pada waktu itu, Pemerintah berfungsi sebagai penyeimbang, melalui pemberian subsidi bantuan bagi sekolah-sekolah pada masyarakat yang benar-benar kurang mampu.

Memperhatikan hasil identifikasi permasalahan dalam Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Pada Pendidikan Dasar di Kabupaten Jepara, maka rumusan masalahnya, sebagai berikut: 1) Sejauhmanakah partisipasi

masyarakat kategori formal; komite sekolah dan dewan pendidikan jepara dalam pendidikan dasar baik negeri maupun swasta di kabupaten Jepara tahun 2017. 2) Sejauhmanakah partisipasi masyarakat kategori non formal; LSM, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, organisasi politik, tokoh agama dan tokoh masyarakat jepara dalam pendidikan dasar baik negeri maupun swasta di kabupaten Jepara tahun 2017. 3) Bagaimanakah model partisipasi masyarakat yang dapat mendorong peran serta secara aktif dalam pendidikan dasar di kabupaten Jepara tahun 2017.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian non eksperimental yang diklasifikasikan ke dalam *Ex post Facto*. Populasi penelitian ini adalah Masyarakat Jepara non pemerintah (kategori formal; dewan pendidikan dan komite sekolah dan non formal; LSM, Organisasi keagamaan, kepemudaan, orsospol dan tokoh agama dan masyarakat) yang mempunyai perhatian dan peran terhadap pendidikan tahun 2017 yang berjumlah 2048 Responden. Sampel penelitian menggunakan teknik Cluster random sampling (pengambilan sampel secara acak berumpun) dengan prosentase 10% maka responden Penelitian 205 Orang.

Teknik pengumpulan data dan teknik analisa data; *Angket tertutup* pada variabel partisipasi masyarakat formal dan non formal dalam pendidikan dasar kabupaten Jepara tahun 2017 dengan *Teknik analisis statistik deskriptif* dan *angket terbuka* pada variabel tentang model partisipasi masyarakat yang dapat mendorong peran serta secara aktif dalam pendidikan dasar di kabupaten Jepara tahun 2017 dengan analisis SWOT.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat tiga temuan dalam penelitian ini. Temuan pertama adalah hasil analisis tentang Sejauhmanakah partisipasi masyarakat kategori formal; komite sekolah dan dewan pendidikan jepara dalam pendidikan dasar baik negeri maupun swasta di kabupaten Jepara tahun 2017. Temuan kedua adalah hasil analisis tentang Sejauhmanakah partisipasi masyarakat kategori non formal; LSM, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, organisasi politik tahun, tokoh agama dan tokoh masyarakat jepara dalam pendidikan dasar baik negeri maupun swasta di kabupaten Jepara tahun 2017. Temuan ketiga adalah hasil analisis tentang Bagaimanakah model partisipasi masyarakat yang dapat mendorong peran serta secara aktif dalam pendidikan dasar di kabupaten Jepara tahun 2017.

### 1. Data dan Analisa Variabel tentang partisipasi masyarakat kategori formal; komite sekolah dan dewan pendidikan jepara dalam pendidikan dasar baik negeri maupun swasta di kabupaten Jepara tahun 2017.

Temuan pertama dari variabel di atas dapat disajikan sebagai berikut: masyarakat non pemerintah kategori formal; Dewan Pendidikan Jepara dan Komite sekolah/Madrasah tahun 2017 yang mempunyai peranan dan perhatian terhadap pendidikan dasar antara lain 0,98% mempunyai partisipasi sangat rendah, 9,8% mempunyai partisipasi pendidikan rendah, 64,71% berpartisipasi tinggi dan 24,51% berpartisipasi terhadap pendidikan dasar dan menengah di Jepara kategori sangat tinggi. Kemudian peneliti menguraikan lebih lanjut tentang responden masyarakat non pemerintah katagori formal dengan sub masyarakat dan sub-sub masyarakat dari responden tersebut, dapat di tunjukkan sebagai berikut:

1. Dewan Pendidikan Jepara (DPJ) yang mempunyai peranan dan perhatian terhadap pendidikan dasar di kabupaten Jepara tahun 2017 masuk klasifikasi rendah (33,33%) dan tinggi (66,67 %).
2. Komite sekolah/Madrasah yang memiliki peranan dan perhatian terhadap pendidikan dasar di kabupaten Jepara tahun 2017 mempunyai klasifikasi sangat rendah (1,01%), rendah (8,08%), tinggi (60,61%) dan sangat tinggi (30,30%); penemuan tersebut terdistribusi kepada:
   a. Komite Sekolah/ Madrasah Pendidikan Dasar memiliki peranan dan perhatian terhadap pendidikan di kabupaten Jepara tahun 2017 masuk klasifikasi rendah (8,79%), tinggi (63,74%) dan sangat tinggi (27,47%), yang terdiri-dari Responden Pendidikan dasar negeri kategori rendah (12,5%), tinggi (62,50%) dan sangat tinggi (25%), kemudian responden Pendidikan dasar Swasta kategori tinggi (66,67%) dan sangat tinggi (33,33%). Selanjutnya responden lebih khusus pada satuan pendidikan dapat kita tunjukkan sebagai berikut;

Responden SD/MI negeri kategori rendah (16,95%), tinggi (57,63%) dan sangat tinggi (25,42%) , Responden SD/MI Swasta klasifikasi tinggi (58,82%) dan sangat tinggi (41,18%), kemudian untuk responden SMP/MTs Negeri semua masuk kategori Tinggi (100%) terakhir Responden SMP/MTs Swasta klasifikasi tinggi (80%) dan sangat tinggi (20%).

b. Komite Sekolah/Madrasah Pendidikan menengah mempunyai peranan dan perhatian terhadap pendidikan di kabupaten Jepara tahun 2017 masuk klasifikasi sangat rendah (12,5%), rendah (12,5%), tinggi (75%), yang terdiri- dari Responden Pendidikan menengah negeri kategori rendah (33,33%) dan tinggi (66,67%), kemudian responden Pendidikan menengah Swasta kategori sangat rendah (20%) dan tinggi (80%).
c. Masyarakat formal baik Dewan Pendidikan Jepara dan Komite Sekolah/Madrasah berdasarkan domisili responden di daerah perkotaan (Kecamatan Tahunan dan Kecamatan Jepara) mempunyai peranan dan perhatian terhadap pendidikan dasar dan menengah di kabupaten Jepara tahun 2007 masuk klasifikasi sangat rendah (2,50%), rendah (15%), tinggi (55%) dan sangat tinggi (27,50%), kemudian responden masuk daerah pedesaan (14 kecamatan selain kecamatan Jepara dan tahunan) termasuk katagori rendah (11,29%), tinggi (66,13%) dan sangat tinggi (22,58%).

Data di atas menunjukkan keiutsertaan masyarakat non pemerintah kategori formal baik DPJ maupun Komite sekolah / madrasah terhadap pendidikan dasar di kabupaten jepara tahun 2017 secara umum sudah melaksanakan partisipasi dalam bentuk perilaku dengan tingkatan mulai terendah (tingkat ke 1) sampai tertinggi (tingkat ke 4) antara lain; *Pertama* Hanya dalam menggunakan jasa pelayanan yang tersedia, misalnya memasukkan anak ke sekolah. *Kedua* peran serta dengan memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga. *Ketiga* Peran serta dalam bentuk keikutsertaan, yang berarti menerima secara pasif apa yang telah diputuskan oleh pihak lain. Misalkan, Komite sekolah / madrasah memutuskan orang tua membayar iuran bagi setiap anak sekolah, dan orang tua menerima keputusan ini dengan mematuhinya. *Keempat* Peran serta melalui adanya konsultasi mengenai hal-hal tertentu. Misalnya kepala sekolah berkonsultasi dengan komite sekolah/madrasah tentang program sekolah dan orang tua murid mengenai masalah pendidikan anak-anak mereka.

**2. Data dan Analisa Variabel tentang partisipasi masyarakat kategori non formal; LSM, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, organisasi politik, tokoh agama dan tokoh masyarakat jepara dalam pendidikan dasar baik negeri maupun swasta di kabupaten Jepara tahun 2017.**

Temuan pertama dari variable di atas dapat disajikan sebagai berikut: Masyarakat non pemerintah katagori non Formal; terorganisasi (LSM, Organisasi Kepemudaan, ORMAS, dan Orsospol) dan tidak terorganisir (Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat) tahun 2017 yang mempunyai peranan dan perhatian terhadap pendidikan dasar antara lain 2,91% mempunyai partisipasi pendidikan kategori buruk, 37,86% berpartisipasi baik dan 59,23% berpartisipasi terhadap pendidikan kategori sangat baik Kemudian peneliti menguraikan lebih lanjut tentang responden masyarakat non pemerintah katagori non formal dengan sub masyarakat dan sub-sub masyarakat dari responden tersebut, dapat di tunjukkan sebagai berikut:

a. Masyarakat yang terorganisir seperti LSM, Organisasi Kepemudaan, ORMAS, dan Orsospol 2004 yang mempunyai peranan dan perhatian terhadap pendidikan dasar di kabupaten Jepara tahun 20017 masuk klasifikasi baik (12,5%) dan sangat baik (87,5%).
b. Masyarakat tidak terorganisasi; Tokoh Agama dan tokoh masyarakat yang memiliki peranan dan perhatian terhadap pendidikan dasar di kabupaten Jepara tahun 2017 mempunyai klasifikasi buruk (3,16%), baik (40%) dan sangat baik (56,84%)
c. Masyarakat non formal baik yang terorganisasi (LSM, Organisasi Kepemudaan, ORMAS, dan Orsospol)

maupun tidak terorganisasi (Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat) berdasarkan domisili responden di daerah perkotaan (Kecamatan Tahunan dan Kecamatan Jepara) dasar di kabupaten Jepara tahun 2017 masuk klasifikasi buruk (5,13%), baik (52,28%) dan sangat baik (43,59%), kemudian responden masuk daerah pedesaan (14 kecamatan selain kecamatan jepara dan tahunan) termasuk katagori buruk (5,13%), baik (52,28%) dan sangat baik (43,59%).

Data di atas menunjukkan keikutsertaan masyarakat non pemerintah kategori non formal baik yang terorganisir (LSM, Organisasi Kepemudaan, ORMAS, dan Orsospol) maupun yang tidak terorganisir (tokoh agama dan masyarakat) terhadap pendidikan dasar di kabupaten jepara tahun 2017 secara umum sudah melaksanakan partisipasi dalam bentuk sikap dengan tingkatan mulai terendah (tingkat ke 1) sampai tertinggi (tingkat ke 4) antara lain; *Pertama* Hanya dalam menggunakan jasa pelayanan yang tersedia, misalnya memasukkan anak ke sekolah. *Kedua* peran serta dengan memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga. *Ketiga* Peran serta dalam bentuk keikutsertaan, yang berarti menerima secara pasif apa yang telah diputuskan oleh pihak lain. Misalkan, Komite sekolah/madrasah memutuskan orang tua membayar iuran bagi setiap anak sekolah, dan orang tua menerima keputusan ini dengan mematuhinya. *Keempat* Peran serta melalui adanya konsultasi mengenai hal-hal tertentu. Misalnya kepala sekolah berkonsultasi dengan komite sekolah/ madrasah tentang program sekolah dan orang tua murid mengenai masalah pendidikan anak-anak mereka.

## 3. Data dan analisa variasi tentang model partisipasi masyarakat yang dapat mendorong peran serta secara aktif dalam pendidikan dasar di kabupaten Jepara tahun 2017.

### 3.1. Partisipasi Masyarakat Formal

Dari deskripsi hasil pengisian angket terbuka tentang partisipasi masyarakat dalam pendidikan oleh para responden kategori formal (*Dewan Pendidikan Jepara dan Komite Sekolah*), kami melakukan analisis dengan menggunakan metode *SWOT analyse* sebagai berikut:

| ***Kekuatan/ Kelemahan*** <br> ***Peluang/ Ancaman*** | ***Strength (S)*** <br>• Penggunaan jasa pelayanan pendidikan <br>• Kontribusi dana, bahan dan tenaga <br>• Keikutsert aan dalam arti secara pasif <br>• Peran serta dalam hal konsultasi | ***Weakness (W)*** <br>• Tidak terlibat dalam hal pelayanan <br>• Tidak terlibat sebagai pelaksana kegiatan <br>• Tidak terlibat dalam pengambil an keputusan |
|---|---|---|
| ***Opportunity (O)*** <br>• Ketersedia an anggaran pendidikan <br>• DPJ dan Komite sebagai wadah dan penyalur aspirasi masyarakat <br>• Adanya payung hukum untuk partisipasi masyarakat | ***Strategi SO*** <br>• DPJ atau komite memfasilit asi komunikas i antara masyarakat dengan sekolah | ***Strategi WO*** <br>• Meningka tkan keterlibata n dengan memanfaa tkan komite sekolah terutama dalam pengambilan kebijakan <br>• Mengadak an kegiatan di sekolah dengan masyarakat sebagai pelaksana |
| ***Treaths (T)*** <br>• Komite sekolah kurang diberdayak an <br>• Kurangnya sosialisasi tentang partisipasi pendidikan di masyarakat | ***Strategi ST*** <br>• Partisipasi dengan menyekolahka n anak <br>• Memberikan bantuan kepada sekolah, baik dana maupun tenaga | ***Strategi WT*** <br>• Sosialisasi tentang pertisipasi masyarakat dalam pendidikan <br>• Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam rapat sekolah <br>• Pemberdayaan komite sekolah sesuai tupoksinya |

### 3.2 Partisipasi Masyarakat non Formal

Dari deskripsi hasil pengisian angket terbuka tentang partisipasi masyarakat dalam pendidikan oleh para responden kategori non formal (*LSM, OKP, Ormas, Orsospol, Tomas dan Toga*), kami melakukan analisis dengan menggunakan metode *SWOT analyse* sebagaimana berikut:

| ***Kekuatan/ Kelemahan*** <br><br> ***Peluang/ Ancaman*** | ***Strength (S)*** <br>• Penggunaan jasa pelayanan pendidikan <br>• Kontribusi dana, bahan dan tenaga <br>• Keikutsertaan secara pasif | ***Weakness (W)*** <br>• Kurangny a komunika si seperti konsultasi <br>• Tidak terlibat dalam hal pelayanan, pelaksana kegiatan maupun dalam pengambi lan keputusan <br>• Kurangny a inisiatif untuk berpartisi pasi |
|---|---|---|
| ***Opportunity (O)*** <br>• Ketersedi aan anggaran pendidika n <br>• DPJ dan Komite sebagai wadah dan penyalur aspirasi masyarak at <br>• Adanya payung hukum untuk partisipasi masyarakat | ***Strategi SO*** <br>• Pemantauan proses belajar anak <br>• Pemberian beasiswa bagi anak berprestasi dan tidak mampu | ***Strategi WO*** <br>• Meningkatkan keterlibat an dengan memanfa atkan komite sekolah <br>• DPJ atau komite memfasil itasi komunikasi antara masyarak at dengan sekolah <br>• Mengadakan kegiatan di sekolah dengan masyarak at sebagai pelaksana |
| ***Treaths (T)*** <br>• Tidak paham tugas dan fungsi Komite sekolah <br>• Kurangny a sosialisasi tentang partisipasi pendidikan dimasyarak at <br>• Masyarakat apatis dalam pendidikan | ***Strategi ST*** <br>• Partisipasi dengan menyekolah kan anak <br>• Memberi-kan bantuan kepada sekolah, baik dana maupun tenaga <br>• Gerakan orang tua asuh | ***Strategi WT*** <br>• Sosialisa si tentang pendidik an <br>• Meningkatkan keterlibatan masyarak at dalam rapat sekolah <br>• Pemberd ayaan komite sekolah sesuai tupoksinya |
| • Banyak siswa yang drop out <br>• Orang tua lebih mengingink an anaknya bekerja daripada sekolah <br>• Kurangnya waktu untuk memantau perkembangan pendidika n anak | • Penerangan kepada orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi anak | • Membent uk komunitas masyarakat peduli pendidik an |

metode *SWOT analyse* sebagaimana berikut:

Kemudian Peneliti menganalisis Model partisipasi masyarakat perkotaan dan

| ***Kekuatan/ Kelemahan*** <br><br> ***Peluang/ Ancaman*** | ***Strength (S)*** <br>• Penggunaan jasa pelayanan pendidikan <br>• Kontribusi dana, bahan dan tenaga <br>• Keikutsertaan secara pasif | ***Weakness (W)*** <br>• Kurangnya komunikasi seperti konsultasi <br>• Tidak terlibat dalam hal pelayanan, pelaksana kegiatan maupun dalam pengambilan keputusan <br>• Kurangnya inisiatif untuk berpartisi pasi |
|---|---|---|
| ***Opportunity (O)*** <br>• Ketersediaa n anggaran pendidikan <br>• DPJ dan Komite sebagai wadah dan penyalur aspirasi masyarakat <br>• Adanya payung hukum untuk partisipasi masyarakat <br>• Banyak pengusaha besar di daerah perkotaan | ***Strategi SO*** <br>• Pemantauan proses belajar anak <br>• Pemberian beasiswa bagi anak berprestasi dan tidak mampu <br>• Gerakan orang tua asuh | ***Strategi WO*** <br>• Meningkatkan keterlibatan dengan memanfaatkan komite sekolah <br>• DPJ atau komite memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dengan sekolah <br>• Mengadakan kegiatan di sekolah dengan masyarakat sebagai pelaksana |
| ***Treaths (T)*** <br>• Tidak paham tugas dan fungsi Komite sekolah <br>• Kurangnya sosialisasi tentang partisipasi pendidikan di masyarakat <br>• Kurangnya waktu untuk memantau perkembang-an pendidikan anak <br>• Pihak sekolah dan masyarakat masih saling tertutup | ***Strategi ST*** <br>• Partisipasi dengan menyekolah-kan anak <br>• Memberika n bantuan kepada sekolah, baik dana maupun tenaga <br>• Penerangan kepada orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi anak <br>• Menentuka n jam belajar anak <br>• Menamani anak yang sedang belajar dirumah | ***Strategi WT*** <br>• Sosialisasi tentang pendidik an <br>• Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam rapat sekolah terutama dalam pengamb ilan kebijakan <br>• Pemberd ayaan komite sekolah sesuai tupoksinya |

Pedesaan non pemerintah terhadap pendidikan dasar kabupaten Jepara tahun 2017.

Dari deskripsi hasil pengisian angket terbuka tentang partisipasi masyarakat dalam pendidikan oleh para responden di daerah perkotaan di Kabupaten Jepara, kami melakukan analisis dengan menggunakan

Dari deskripsi hasil pengisian angket terbuka tentang partisipasi masyarakat dalam pendidikan oleh para responden di daerah pedesaan di Kabupaten Jepara, kami melakukan analisis dengan menggunakan metode *SWOT analyse* sebagaimana berikut:

| ***Kekuatan/ Kelemahan*** <br> ***Peluang/ Ancaman*** | ***Strength (S)*** <br>• Penggunaa n jasa pelayanan pendidikan <br>• Kontribusi dana, bahan dan tenaga <br>• Keikutserta an secara pasif | ***Weakness (W)*** <br>• Kurangny a komunika si seperti konsultasi <br>• Tidak terlibat dalam hal pelayanan, pelaksana kegiatan maupun dalam pengambi lan keputusan <br>• Kurangny a inisiatif untuk berpartisi pasi |
|---|---|---|
| ***Opportunity (O)*** <br>• Ketersediaan anggaran pendidikan <br>• DPJ dan Komite sebagai wadah dan penyalur aspirasi masyarakat <br>• Adanya payung hukum untuk partisipasi masyarakat <br>• Banyak pengusaha besar di daerah perkotaan | ***Strategi SO*** <br>• Pemantaua n proses belajar anak <br>• Pemberian beasiswa bagi anak berprestasi dan tidak mampu <br>• Gerakan orang tua asuh | ***Strategi WO*** <br>• Meningkatkan keterlibat an dengan memanfa atkan komite sekolah <br>• DPJ atau komite memfasil itasi komunik asi antara masyarak at dengan sekolah <br>• Mengada kan kegiatan disekolah dengan masyarakat sebagai pelaksa-na |
| ***Treaths (T)*** <br>• Tidak paham tugas dan fungsi Komite sekolah <br>• Kurangnya sosialisasi tentang partisipasi pendidikan di masyarakat <br>• Kurangnya waktu untuk memantau perkembang an pendidikan anak <br>• Pihak sekolah dan masyarakat masih saling tertutup <br>• Di pedesaan banyak orang yang tidak mampu menyekolahkan anaknya <br>• Banyak siswa yang drop out karena Orang tua lebih menginginkan anaknya bekerja daripada sekolah | ***Strategi ST*** <br>• Partisipasi dengan menyekolahkan anak <br>• Memberikan bantuan kepada sekolah, baik dana maupun tenaga <br>• Penerangan kepada orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi anak <br>• Menentukan jam belajar Anak <br>• Menemani anak yang sedang belajar dirumah <br>• Pemberian beasiswa terutama bagi anak yang tidak mampu | ***Strategi WT*** <br>• Sosialisasi tentang pendidikan <br>• Meningka tkan keterlibatan masyaraka t dalam rapat sekolah terutama dalam pengambil an kebijakan <br>• Pemberda yaan komite sekolah sesuai tupoksi-nya |

Peran serta masyarakat dalam pendidikan tidak akan muncul begitu saja tanpa adanya upaya-upaya untuk menggalangnya. Upaya untuk menggalang dan mendorong peran serta masyarakat perlu dilakukan agar masyarakat tergerak dalam meningkatkan mutu pendidikan. Mengapa? Karena perlakuan sekolah selama ini terhadap mereka, terkesan hanya sebagai pelengkap saja. Hal yang demikian membentuk opini bagi masyarakat bahwa sekolah merupakan tanggung jawab pemerintah.

Disinilah diperlukan kegigihan kepala sekolah dan guru untuk proaktif menggalang dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat, bahwa masyarakat ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan pendidikan anak mereka. Berbagai cara mendorong peran serta masyarakat, diantaranya adalah:

**Pertama**, mengundang orang tua murid, Komite Sekolah/ Madrasah, dan tokoh masyarakat dalam sebuah diskusi tentang bagaimana cara meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Kepala sekolah menyajikan keadaan dan capaian sekolah selama ini, visi dan misi sekolah serta keadaan yang diverbalkan bagi anak di masa depan. Moderator merangsang peserta diskusi sehingga mereka mau mengungkapkan unek-uneknya. Biasanya, jika kesempatan dibuka lebar-lebar dan dalam suasana kekeluargaan, maka orang akan berbicara pula, dan pembicaraan mereka pada umumnya lugu/ polos.

**Kedua**, perlunya menjelaskan kepada masyarakat bahwa tanggung jawab pendidikan bukan hanya pada pemerintah, melainkan juga masyarakat. Dengan pemahaman yang benar tentang konsep ini, maka perlahan-lahan masyarakat aka mengubah sikapnya. Mereka akan semakin merasa bertanggung jawab terhadap pendidikan di sekolah.

**Ketiga**, kepala sekolah dan guru memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk turut mengelola keuangan sekolah, terutama yang bersumber dari masyarakat. Karena kepercayaan yang diberikan tersebut, maka masyarakat akan semakin bergairah untuk memikirkan sekolah. Mereka merasa bahwa kepercayaan yang diberikan oleh sekolah tidak boleh disia-siakan.

**Keempat**, manajemen kepala sekolah hendaknya juga terbuka. Dengan demikian maka masyarakat akan mempercayai apa yang dilakukan oleh sekolah. Karena manajemen yang terbuka itu pulalah, maka peran serta masyarakat dalam pendidikan akan meningkat.

**Gambar Model Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat pada Pendidikan Dasar di Kabupaten Jepara**

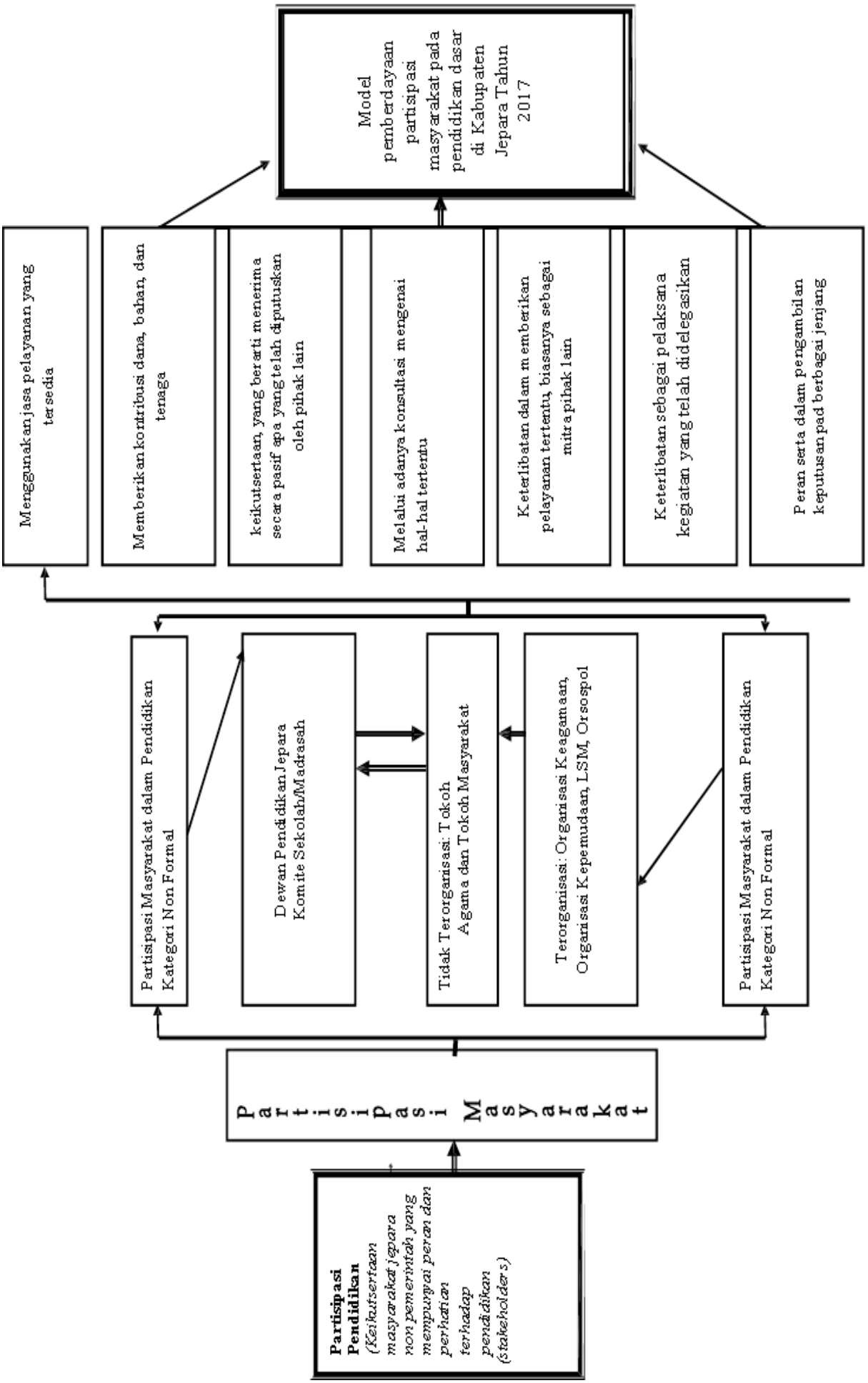
Model pemberdayaan partisipasi masyarakat pada pendidikan dasar di Kabupaten Jepara Tahun 2017
Menggunakan jasa pelayanan yang tersedia
Memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga
keikutsertaan, yang berarti menerima secara pasif apa yang telah diputuskan oleh pihak lain
Melalui adanya konsultasi mengenai hal-hal tertentu
Keterlibatan dalam memberikan pelayanan tertentu, biasanya sebagai mitra pihak lain
Keterlibatan sebagai pelaksana kegiatan yang telah didelegasikan
Peran serta dalam pengambilan keputusan pad berbagai jenjang
Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan Kategori Non Formal
Dewan Pendidikan Jepara Komite Sekolah/Madrasah
Tidak Terorganisasi: Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Terorganisasi: Organisasi Keagamaan, Organisasi Kepemudaan, LSM, Orsospol
Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan Kategori Non Formal
Partisipasi Masyarakat
**Partisipasi Pendidikan** *(Keikutsertaan masyarakat jepara non pemerintah yang mempunyai peran dan perhatian terhadap penidikan (stakeholders)*

## D. SIMPULAN

Dengan mengacu pada pokok atau rumusan masalah penelitian dan hasil data yang terkumpul dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Keikutsertaan masyarakat non Pemerintah kategori Formal baik Dewan Pendidikan Jepara maupun Komite sekolah/Madrasah tahun 2017 yang mempunyai perhatian dan peranan terhadap pendidikan dasar dapat ditunjukkan sebagai berikut: 0,98% mempunyai tingkat partisipasi sangat rendah, 9,8% memiliki tingkat partisipasi pendidikan rendah, 64,71% berpartisipasi tinggi dan 24,51% berpartisipasi pendidikan klasifikasi sangat tinggi.
2. Masyarakat non pemerintah katagori non Formal; terorganisasi (LSM, Organisasi Kepemudaan, ORMAS, dan Orsospol) dan tidak terorganisir (Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat) kabupaten Jepara tahun 2017 yang mempunyai peranan dan perhatian terhadap pendidikan dasar dapat dipaparkan sebagai berikut 2,91% mempunyai partisipasi pendidikan kategori buruk, 37,86% berpartisipasi baik dan 59,23% berpartisipasi terhadap pendidikan kategori sangat baik.
3. Model partisipasi masyarakat yang dapat mendorong peran serta secara aktif dalam pendidikan dasar di kabupaten Jepara tahun 2017 antara lain:
   a. Pemberdayaan Menejemen berbasis masyarakat (MBS) sebagai upaya kongkret otonomi sekolah/Madrasah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui antara lain: keleluasaan mengelola sumber daya, partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Sedangkan peningkatan mutu diperoleh antara lain melalu control dan partisipasi orangtua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah, berlakunya sistem insentif, dan lain- lain.
   b. Mengaplikasikan Model kepemimpinan visioner yaitu yang memiliki karakteristik antara lain *kredibilitas* dan dapat dipercaya oleh pengikutnya (mengakar), *integritas* yang tinggi terhadap pekerjaannya, *Kompeten* di bidangnya dan mampu membangun komunikasi, *Konsisten* dan *loyal*, yakni memiliki ketaatan pada misi dan visi organisasi dan Terbuka, yakni tidak menutup diri dari input yang berasal dari luar.
   c. Mengimplementasikan Partisipasi atau keikutsertaan masyarakat daam pendidikan Keterlibatan masyarakat dalam memberikan pelayanan tertentu, biasanya sebagai mitra pihak lain, Keterlibatan sebagai pelaksana kegiatan yang telah didelegasikan, Peran dalam pengambilan keputusan pada berbagai jenjang.

## E. DAFTAR PUSTAKA


Anas Sudjono, *Pengantar Statistika Pendidikan* (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2014)

Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Kalimah, 2001)

Bagong Suyanto, Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Tindakan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006)

Donal Ary, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan* ter. Arief Furchan (Surabaya: Usaha Nasional, 2002)

Eddy Kurniadi, *Peranan Pemuda dalam Pembangunan Politik di Indonesia (Analisis Studi berdasarkan Pendekatan Sejarah dan Sosio Kultural)*, (Bandung: Angkasa, 2007)

Fauzie Nurdi dan M. Afif Anshori, dan Khaeroni dkk. ( Editor ), *Islam dan Hegemoni Sosial*, Jakarta, Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama RI, 2001

H.A. Malik Fadjar, *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam*, diedit oleh H. Mustofa Syarif dan Juanda Abubakar, 1998.

Ibnu Hadjar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo, 2009),

Ine I. Amirman Yousdia Zainal Arifin, *Penelitian dan Statistik Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013),

Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial (suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya)* (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2005)

Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial (suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya)* (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2015)

James W. Vander Zanden, *The Social Experience*, 1988

Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 2010)

M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis (Untuk Ilmu-ilmu Soisial dan Ekonomi)* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2015)

Madya Ekosusilo, *Sekolah unggulan Berbasis Nilai*, (Sukoharjo, UNIVET Bantara Press, 2005)

Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Hanindita, 2015)

Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2005)

Pidarta, Made, *Landasan Kependidikan Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)

Pidarta, Made, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2004)

Sanaky, Hujair, AH., *Paradigma Pendidikan Islam: membangun masyarakat Madani Indonesia*, (Yogyakarta : Safiria Insani Press, 2003)

Sofian Effendi dan Chris Manning, *Metode Penelitian Survai*, Ed. Masri Singarimbundan Sofian Effendi (Jakarta: LP3ES, 2009)

Sudjana, *Metoda Statistika* (Bandung: Tarsito, 2012)

Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: Alfabeta, 2007)

Suhadi Ibnu, *Jenis dan Desain Penelitian Kuantitatif* (Malang: Lembaga Penelitian IKIP Malang)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)

Suharsimi Arikunto, Suhardjono dkk, *Penelitian tindakan Kelas*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2007)

Sumanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Aplikasi Metode Kuantitatif dan Statistika dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offet, 2015)

Suparlan, *Menjadi Guru Efektif*, (Yogjakarta: Hikayat, 2005)

Tulus Winarsunu, *Statistik Dalam Penelitian Psikologi dan Pendidikan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2006)

Zakiah Daradjat, *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)